

Pedagang Pasar Anyar Unjuk Rasa Minta Relokasi ke Satu Tempat

TANGERANG (IM)- Ratusan pedagang Pasar Anyar Kota Tangerang melakukan unjuk rasa di Kantor Wali Kota Tangerang, Kamis (16/11). Mereka menuntut agar PD Pasar Kota Tangerang merelokasi pedagang ke satu tempat di Metropolis Town Square.

Ketua Forum Pedagang Pasar Anyar Kota Tangerang (FKPPA), HM Zaenudin mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan pihaknya dengan Pemkot Tangerang, Kamis (16/11), Pemkot Tangerang tidak mengizinkan pedagang basah Pasar Anyar untuk menempati pusat perbelanjaan Metropolis Town Square.

Alhasil, forum pedagang pasar meminta Pemkot Tangerang untuk melakukan negosiasi dengan pengelola agar para pedagang basah dapat berkumpul dengan pedagang lainnya dalam satu lokasi di Metropolis Town Square.

"Kita akan melakukan negosiasi kepihak Metropolis Town Square agar pedagang basah dapat berjualan di Metropolis. Suratnya nanti kita kawal, mudah-mudahan

apa yang diharapkan oleh rekan rekan pedagang dapat segera terwujud," ujarnya, Kamis, 16 November 2023.

Zaenudin mengatakan, para pedagang mendukung program pemerintah melakukan revitalisasi Pasar Anyar. Namun para pedagang memohon agar Pemkot Tangerang dalam proses relokasi pedagang dilakukan di satu tempat saja.

Sebelumnya, dalam proses revitalisasi Pasar Anyar, Pemkot Tangerang berencana melakukan relokasi pedagang ke lima lokasi yaitu Pasar Laris, Jatake, Mal Metropolis Town Square, Banjar Wijaya, dan Mall Plasa Shinta. Proses revitalisasi Pasar Anyar selama 10 bulan.

Sekadar diketahui, Pasar Anyar Tangerang adalah pasar tradisional yang berdiri sejak 1967-an dan merupakan pasar kebanggaan warga Kota Tangerang.

Pasar yang berlokasi di Kecamatan Tangerang ini berdiri di lahan seluas 24.680 meter persegi yang di dalamnya berisikan 1.800 kios dan 238 los. ● pp

Warga Terdampak Normalisasi Sungai Cibanten Tidak Dapat Kompensasi

SERANG (IM)- Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) Banten tidak memberikan kompensasi kepada 80 warga yang rumahnya terdampak normalisasi Sungai Cibanten, karena rumah tersebut berdiri di atas tanah milik negara.

"Total ada 80 rumah yang berada di sepanjang bantaran Sungai Cibanten, dan puluhan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik negara," kata Kepala Bidang PJSJ BBWSC3 Banten, David Partonggo Oloan Marpaung, di Serang, Banten, kemarin.

La mengatakan, pemerintah tidak mungkin memberikan ganti rugi jika bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara.

David menyampaikan akan melakukan pelepasan Sungai Cibanten mulai dari Tanggul Kenari hingga Gunung Karet sebagai upaya normalisasi sungai tersebut agar tidak terjadi banjir.

"Dari Tanggul Kenari sampai Gunung Karet itu

semua dinormalisasi. Kalau tidak kita lebak takutnya efek banjir yang dulu itu terjadi lagi sehingga berpotensi bahaya," katanya.

Dalam rapat, David mengatakan Pemerintah Kota Serang memberikan solusi terhadap puluhan warga yang terdampak normalisasi Sungai Cibanten untuk direlokasi dan tinggal di Rusunawa Margaluyu, Kota Serang, Banten.

"Pemkot memperbolehkan mereka direlokasi ke rusunawa. Namun, sampai kapan mereka di rusunawa itu belum ada kesepakatan," kata dia.

Menurut David, Pemerintah Kota Serang dengan BBBWSC belum sepakat dan hasil dari rapat ini akan kembali disampaikan ke pimpinan masing-masing agar mendapatkan solusi terbaik.

"Jadi, rapat hari ini belum ada kesimpulannya, nanti akan kita sampaikan dulu ke pimpinan masing-masing untuk solusinya seperti apa," katanya. ● pra



IDN/ANTARA

PAMERAN PEMBANGUNAN PAPUA BARAT DAYA

Pj Gubernur Muhammad Musaad membeli sejumlah produk UMKM pada pameran Pembangunan Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong, Kamis (16/11). Dalam rangka memperingati HUT ke 22 Otonomi Khusus di Papua (21 November) dan menjelang HUT ke-1 Provinsi Papua Barat Daya (9 Desember), Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pameran industri dan UMKM di wilayah tersebut.

DEMI AMANKAN ASET DARI KLAIM SEPIHAK

Sertifikasi Situ dan Danau Milik Pemprov Banten Dikebut

Saat ini tercatat ada 137 situ dan danau milik Pemprov Banten yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Aset itu belum sepenuhnya tersertifikasi, sehingga rawan diklaim, diakui dan diduduki sejumlah oknum. Dari 137 situ dan danau baru 10 situ dan danau yang telah disertifikasi menjadi Hak Penggunaan Lahan.

TANGSEL (IM)- Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupaya melakukan sertifikasi aset berupa situ, danau, embung, dan waduk.

Proses sertifikasi aset tersebut terus dikebut demi mengamankan aset dari klaim pihak-pihak yang memanfaatkan aset milik Pemprov Banten demi

kepentingan pribadi.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada BPKAD Pemprov Banten, Didin Lukman mengatakan, saat ini tercatat ada 137 situ dan danau milik Pemprov Banten yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Aset itu belum sepenuhnya tersertifikasi, sehingga rawan diklaim, diakui dan diduduki sejumlah oknum.

"Dari 137 situ dan danau yang tersebar di kota-kabupaten di Provinsi Banten, baru 10 situ dan danau yang telah disertifikasi menjadi Hak Penggunaan Lahan," ujar Didin Lukman saat melakukan Sosialisasi Penyalahgunaan dan Pemanfaatan Situ, Danau, Embung dan Waduk di Gadling Serpong, Kamis (16/11).

Menurut Didin, upaya sertifikasi dilakukan melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat, dengan memberi pemahaman bahwa situ dan danau yang ada di wilayah Provinsi Banten merupakan sepenuhnya milik Pemprov Banten.

"Permasalahan yang ada itu kan sebagian situ, danau, embung dan waduk di Banten dikuasai sebagian masyarakat atau perusahaan. Mereka memanfaatkan dengan menguasai dengan mendirikan rumah dan sebagainya. Jadi di sini kami sosialisasikan bahwa

aset kita diduduki pihak lain, selain itu masyarakat jadi tahu bagaimana memanfaatkan lahan situ atau danau untuk kehidupan ekonomi mereka," ujar Faizal.

Faizal mengatakan, upaya mensertifikasi seluruh aset milik Pemprov Banten sudah berlangsung sejak tahun lalu, sehingga upaya ini akan terus dikebut ke depannya.

Faizal mengatakan, persoalan yang kerap terjadi di lapangan, banyak aset Pemprov Banten diklaim, diduduki atau timpang tindih, sehingga hal ini membuat upaya sertifikasi memakan waktu dengan berbagai dampak hukum yang timbul.

"Kami mendukung aset-aset itu dilindungi di lapangan, minimal setiap aset kita dipasangi plang, dipagar dan dijaga pengamanannya, agar tidak ada lagi pihak yang menguasai," jelasnya. ● pp

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faizal mengatakan, DPRD Provinsi Banten terus mendorong BPKAD Banten untuk mempercepat seluruh proses sertifikasi aset milik Pemprov Banten.

Faizal mengatakan, kegiatan sosialisasi penyalahgunaan dan pemanfaatan situ dan danau kepada masyarakat penting dilakukan agar saat pelaksanaan sertifikasi di lapangan sudah tidak ada lagi miss komunikasi dan gejala yang timbul.

"Dengan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat akan bisa menjadi pengawas jika ada

lainnya tengah mengolah lahan persawahan dengan traktor. Pemerintah daerah menargetkan gerakan percepatan tanam padi pada November seluas 20 ribu hektare, karena laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang memprediksi musim penghujan November-Desember 2023.

Pihaknya tengah mempersiapkan sarana dan prasarana produksi pangan mulai benih, alat pertanian, pompa, perbaikan irigasi, penyediaan pupuk, hingga obat pembasmi hama. Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan benih cadangan nasional dan benih cadangan daerah untuk petani yang gagal panen akibat El Nino.

"Kami akan membagikan benih cadangan nasional dan cadangan daerah kepada petani yang gagal panen akibat dampak kemarau panjang atau La Nino dengan masing-masing 25 kilogram," katanya. ● pra

segera ditanami padi. "Kami merasa senang sudah bisa mengolah lahan persawahan untuk dilakukan percepatan tanam padi menyusul curah hujan tinggi," kata Abdul.

Ketua Kelompok Tani Sukamulya Citeras Kabupaten Lebak, Arsyad (45) mengaku dirinya dengan petani lain di sini tengah mengerjakan pengolahan lahan persawahan untuk bisa dipercepat gerakan tanam padi.

Selama ini, hampir setiap sore dilanda hujan sehingga areal persawahan terpenuhi untuk ketersediaan air.

"Kami dan petani lainnya dapat melaksanakan percepatan tanam padi akhir November 2023," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lebak, Deni Iskandar mengatakan saat ini petani diberbagai lokasi mulai melakukan gerakan percepatan tanam padi juga sebagian

lainnya tengah mengolah lahan persawahan dengan traktor. Pemerintah daerah menargetkan gerakan percepatan tanam padi pada November seluas 20 ribu hektare, karena laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang memprediksi musim penghujan November-Desember 2023.

Pihaknya tengah mempersiapkan sarana dan prasarana produksi pangan mulai benih, alat pertanian, pompa, perbaikan irigasi, penyediaan pupuk, hingga obat pembasmi hama. Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan benih cadangan nasional dan benih cadangan daerah untuk petani yang gagal panen akibat El Nino.

"Kami akan membagikan benih cadangan nasional dan cadangan daerah kepada petani yang gagal panen akibat dampak kemarau panjang atau La Nino dengan masing-masing 25 kilogram," katanya. ● pra

Warga Banten Tak Puas Terhadap Kinerja Pj Gubernur Al Muktabar

SERANG (IM)- Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) mengeluarkan hasil survei tentang kepuasan terhadap kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap Al Muktabar yang sudah satu tahun lebih menjabat Pj Gubernur Banten masih rendah yakni 29,5 persen.

Rinciannya, warga Banten yang menjawab sangat puas sebanyak 1,4 persen, cukup puas 28,1 persen, kurang puas 21,3 persen, tidak puas sama sekali 7,1. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak jawab 42,1 persen.

Direktur Operasional dan Data IPRC, Tedy Nurzaman mengatakan, penyumbang rendahnya kepuasan terhadap Pj Gubernur Banten Al Muktabar lantaran belum ada kebijakan yang populer.

"Masyarakat masih menilai Al Muktabar belum memberikan dobrakan, kebijakan populer yang bisa

meningkatkan popularitas beliau sebagai Pj gubernur," katanya, Kamis (16/11).

Menurutnya, keberhasilan dalam menjalankan kebijakan yang populer sangat berpengaruh pada tingkat elektabilitas terhadap sosok pemimpin. "Tingkat kepuasan terhadap Al Muktabar 29,5 persen. Ini sangat rendah. Tingkat kinerja dengan popularitas berdampak iya. Tingkat pengenalan tokoh, gubernur akan berkorelasi terhadap kinerja," jelasnya.

Selain itu, keterpilihan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten tidak melibatkan masyarakat atau tidak melalui Pemilu. Sehingga pergantian kepemimpinan dari hasil Pemilu dan penunjukan dari Pemerintah Pusat mempengaruhi pada kediklanan Al Muktabar di mata masyarakat.

"Al Muktabar menjadi gubernur tidak melewati proses Pemilu. Tentunya tidak dirayakan, tingkat pengenalan rendah," ungkapnya. ● pra

Situs Web MUI Tangsel Diretas, Promosikan Konten Porno dan Judi

TANGSEL (IM)- Situs web Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan, www.muitangsel.or.id, diretas. Di situs web tersebut ada beberapa artikel berbahasa Inggris yang mempromosikan konten porno. Ada pula artikel berbahasa Estonia yang mempromosikan judi online dan kasino. Selain itu, ada artikel berbahasa Rusia yang mempromosikan situs payment aggregator.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Umum MUI Tangsel, Abdul Rojak mengatakan, peretasan itu berlangsung semenjak MUI Tangsel menggencarkan seruan untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. "Iya, betul di-hack. Sejak kemarin,

sejak MUI Tangsel masif boikot produk Israel," kata Abdul, Kamis (16/11).

Abdul mengaku belum mengetahui identitas pelaku yang meretas situs resmi MUI Tangsel. Namun, ia berkeyakinan bahwa peretas merupakan seorang pendukung Israel. "Yang pasti yang hack itu pro Israel," ucap dia.

Saat ini, MUI Tangsel akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel untuk menangani permasalahan tersebut. "Kami akan rapat khusus mengenai masalah hack web MUI ini. MUI Tangsel akan kerja sama dengan Kominfo Tangsel untuk keamanan website MUI Tangsel," tutur Abdul. ● pp

Petani Lebak Mulai Olah Sawah Guna Percepat Tanam Padi

LEBAK (IM)- Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten mulai mengolah lahan persawahan guna mendukung percepatan gerakan tanam padi menyusul tibanya musim hujan.

"Kita menargetkan percepatan tanam pada akhir November dan panen Februari 2024," kata Abdul (50) seorang petani di Desa Tambak Kabupaten Lebak, Kamis (16/11).

Pengolahan persawahan seluas satu hektare itu dibutuhkan waktu sampai tanam dua pekan ke depan. Saat ini, pihaknya bersama petani lain di wilayahnya masih melakukan pekerjaan traktor untuk menggarap lahan areal persawahan seluas 40 hektare.

Penggunaan traktor mengolah lahan persawahan dinilai lebih irit biaya produksi dibandingkan menggunakan cangkul maupun bajak kerbau. Selain itu juga pekerjaannya lebih cepat untuk merampungkan pengolahan lahan persawahan untuk

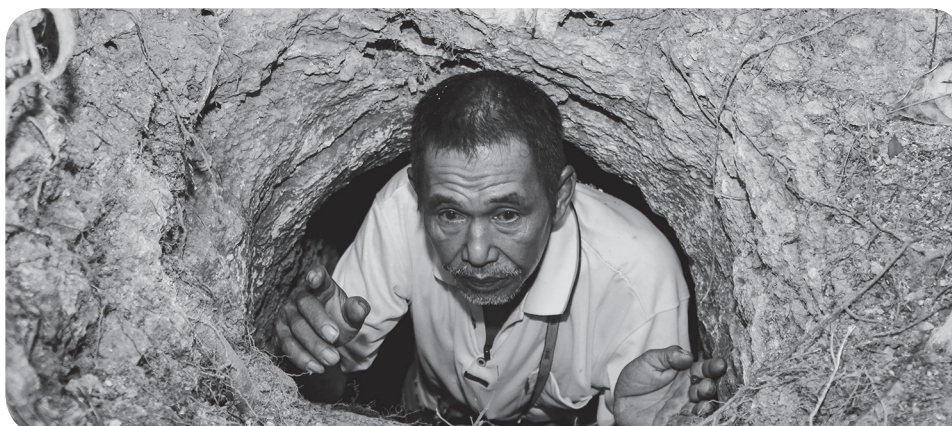
segera ditanami padi. "Kami merasa senang sudah bisa mengolah lahan persawahan untuk dilakukan percepatan tanam padi menyusul curah hujan tinggi," kata Abdul.

Ketua Kelompok Tani Sukamulya Citeras Kabupaten Lebak, Arsyad (45) mengaku dirinya dengan petani lain di sini tengah mengerjakan pengolahan lahan persawahan untuk bisa dipercepat gerakan tanam padi.

Selama ini, hampir setiap sore dilanda hujan sehingga areal persawahan terpenuhi untuk ketersediaan air.

"Kami dan petani lainnya dapat melaksanakan percepatan tanam padi akhir November 2023," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lebak, Deni Iskandar mengatakan saat ini petani diberbagai lokasi mulai melakukan gerakan percepatan tanam padi juga sebagian



IDN/ANTARA

PENEMUAN BUNKER PENINGGALAN JEPANG DI HALMAHERA BARAT

Seorang warga berusaha memasuki lubang masuk bunker peninggalan Jepang yang kondisinya masih utuh di Desa Bobaneigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis (16/11). Bunker tersebut diduga dibangun pada masa peninggalan perang dunia kedua sebagai pos pengintaian tentara Jepang dengan panjang sekitar 76 meter, lebar 1 meter dan tinggi 2 meter yang ditemukan pertama kali oleh seorang warga Sulaiman Musa pada 10 November 2023.



IDN/ANTARA

PRODUKSI TENUN SERAT ALAM

Perajin menyelesaikan pembuatan tenun serat alam di Moyudan, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (16/11). Kerajinan serat alam berbahan dasar lidi, enceng gondok dan pandan itu memperdayakan pekerja dari warga sekitar desa wisata Gamplong, yang dipasarkan ke sejumlah kota seperti Semarang, Bandung dan Jakarta, dijual seharga Rp10-100 ribu.

BMKG: Tangerang Belum Sepenuhnya Musim Hujan, Cenderung Kering

TANGERANG (IM)- Wilayah Kota Tangerang sudah mulai diguyur hujan sejak akhir Oktober lalu, meski demikian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis curah hujan di Kota Tangerang masih rendah.

Pejabat Madya Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) BMKG, Maria Evi Trianasari menuturkan, berdasarkan perhitungan hasil Monitoring Dasarian III Oktober 2023 yang telah dilakukan, curah hujan secara umum yang terjadi di Kota Tangerang masih dalam kriteria "rendah" (0-50 mm) hingga "menengah" (150-200 mm).

Hal ini menunjukkan, Kota Tangerang saat ini belum memasuki musim penghujan secara penuh atau bisa dikategorikan dalam masa transisi.

"Prakiraan awal musim penghujan di Kota Tangerang saat ini masih dalam kategori hujan ringan, artinya masih akan didominasi cuaca yang kering dengan satu atau dua kali hujan saja dalam seminggu. Terlihat, berdasarkan pemantauan yang sama, musim hujan akan dipastikan datang pada November Dasarian II untuk Kota Tangerang bagian selatan dan Desember Dasarian

III untuk Kota Tangerang bagian utara," ujarnya.

La melanjutkan, berdasarkan prediksi yang dilakukan cuaca di Kota Tangerang secara umum akan didominasi cerah berawan, namun juga berpotensi hujan ringan-sedang di berbagai wilayah tertentu. Meski demikian, BMKG juga terus mengimbau masyarakat Kota Tangerang untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menyambut kedatangan musim penghujan ini, terutama di beberapa wilayah yang dinilai rawan banjir.

"Untuk langkah antisipasi yang bisa dilakukan secara bersama-sama, seperti memastikan infrastruktur untuk mengamankan daya serap air, terutama untuk daerah-daerah yang mempunyai topografi rendah dan berada di bantaran sungai," tambahnya.

Selain itu, BMKG juga mengimbau kepada masyarakat Kota Tangerang untuk lebih aktif dalam mencari informasi yang kredibel mengenai perkembangan perubahan cuaca dan iklim, salah satunya melalui situs resmi BMKG Kota Tangerang, yakni di Instagram/@stafog_tng dan http://stageof.tangerang.bmkg.go.id atau di laman resmi BMKG Pusat di bmkg.id. ● pp